

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pembelajaran Informal di komunitas

2.1.1 Pengertian Komunitas

Menurut Wenger (2002, hlm. 4) Komunitas berasal dari bahasa latin yakni *communitas* yang memiliki arti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang bermakna “sama, publik, dibagi oleh semua, atau banyak”. Komunitas merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan yang sama, umumnya memiliki ketertarikan dan tempat tinggal yang sama. Didalam sebuah komunitas manusia, individu-individu yang menjadi anggotanya memiliki kepercayaan, sumber daya, maksud, kebutuhan, resiko, preferensi, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Menurut Soenarno (2002, hlm. 2) komunitas adalah sebuah interaksi sosial dan identifikasi yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.

Loren O. Osbrn dan Martin H. Neumeyer (1984, hlm. 59) “Pada dasarnya setiap orang itu lahir dalam suatu keluarga, serta pada mulanya individu tersebut tidak mengetahui bahwa ia merupakan bagian dari suatu ketetanggaan. Akan tetapi, apabila dia sudah mulai dapat berjalan serta bermain, maka dia akan bermain dengan anak-anak tetangganya atau beberapa dari antara mereka. Pada tahap perkembangan selanjutnya, ia mulai mengetahui bahwa dia tinggal di suatu kampu, suatu desa, bahkan suatu kota. Pada tahapan berikutnya dia akan mulai menyadari bahwa dia merupakan bagian dari suatu bangsa atau suatu negara”.

Penjabaran diatas menunjukkan bahwa seseorang itu dapat menjadi bagian dari beberapa kelompok; dan kecuali keluarga yang berperan sebagai *primary group* keseluruhan itu dapat dikategorikan sebagai sebuah *community* atau komunitas.

Menurut Soenarno (2002, hlm. 11) proses terbentukannya bersifat horisontal hal tersebut dikarenakan diperbuat oleh individu-individu yang berkedudukan setara. Komunitas merupakan sebuah proses interaksi dan identifikasi sosial yang diciptakan dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.

Sedangkan menurut Ancok (2005, hlm. 6) Komunitas (*community*) adalah permukiman yang merupakan sebuah satuan kehidupan yang menempati sebuah wilayah yang terbatas luasnya. Anggota-anggota dari sebuah komunitas dalam

batasan-batasan tertentu memiliki hubungan satu sama lain terutama melalui jalur kekerabatan atau perkawinan dan melalui bentuk interaksi sosial untuk berbagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dari beberapa penjabaran pengetahuan komunitas menurut berbagai pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunitas merupakan sebuah perkumpulan atau kelompok sosial dari beberapa organisme yang saling berbagi lingkungan, umumnya mereka memiliki minat yang sama, bagian dari komunitas ini bersifat horisontal yang artinya bahwa interaksi mereka setara.

2.1.1.1 Ciri-ciri komunitas

Menurut Ancok (2005, hlm. 7) sebuah komunitas itu ada dan merupakan bagian dari sebuah masyarakat (society). Masyarakat dan komunitas memiliki perbedaan hal itu disebabkan karena masyarakat memiliki batasan-batasan wilayah dengan skala dan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan komunitas dan secara jelas sesuai dengan hukum yang berlaku di definisi batasan-batasan wilayahnya. Dibawah ini beberapa ciri-ciri dari sebuah komunitas, sebagai berikut:

a. Kesatuan hidup yang teratur dan tetap

Sebuah komunitas bukanlah sebuah kumpulan sementara atau bisa dikatakan krumuan, maka dari itu komunitas termasuk kedalam jenis kelompok sosial yang memiliki warnanya tersendiri dalam hal kebersamannya. Dari sudut pandang ini pengertian komunitas tidaklah memiliki pengertian yang sama dengan pengertian masyarakat. Jangkauan dan lingkup masyarakat lebih luas dibandingkan dengan jangkauan dan lingkup komunitas. Maka dengan kata lain komunitas merupakan salah satu bagian dari masyarakat, atau satu segmen dari masyarakat.

b. Bersifat teritorial

Para anggota dari sebuah komunitas benar-benar terpaku dan terpadu pada tanah (*territorium*). Ada kemungkinan terjadinya anggota komunitas mempunyai darah, tradisi, dan nasib yang sama atau ketertarikan yang sama. Akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi sudut pandang yang khas dari sebuah komunitas. Begitu pula dengan sosiologi menyatakan unsur teritorial sebagai unsur terpenting dari komunitas.

2.1.1.2 Manfaat mengikuti komunitas

Kehadiran sebuah komunitas pastilah memiliki kebermanfaatan bagi para anggota yang tergabung didalamnya, yang dimana kebermanfaatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Learning

Kesempatan belajar bagi setiap anggota dari sebuah komunitas terbuka luas, hal tersebut karena didalam sebuah komunitas terdapat sebuah pembelajaran informal.

b. Networking

Dengan bergabung dengan sebuah komunitas, para anggota berkesempatan untuk memperluas jaringan dan koneksi. Dan tentunya terdapat peluang untuk memiliki temn-teman baru yang memiliki keterrikan yang sama.

c. Sharing experience

Belajar dari pengalaman adalah salah satu proses belajar yang baik. Dengan bergabung dengan sebuah komunitas akan terdapat banyak kesempatan untuk saling berbagi pengalaman terkait kesamaan ketertarikan dengan anggota lain.

d. Job opportunities

Dengan manfaat memperluas jaringan dan emiliki teman baru maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pun terbuka lebih lebar lagi.

e. Meeting expert

Diantara semua anggota komunitas tentu saja terdapat beberapa anggota yang dapat dikatan sebagai ahli dalam bidangnya. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki ini tentu saja akan dibagikan kepada anggota yang lain.

f. Solution of problems

Sikap saling tolong-menolong merupakan salah satu ciri dari komunitas, karena memiliki ketertarikan yang sama maka timbul sebuah kepedulian. Dari kepedulian itulah muncul sikap saling tolong-menolong. Maka dari itu ketika salah seorang anggota memiliki masalah maka anggota lain akan bahu membahu untuk menolong memecahkan masalah tersebut.

g. Free giveaways

Biasanya goodies banyak tersedia didalam sebuah komunitas yang aktif. Bisa berupa kaos, pin, dan lain sebagainya yang khusus dibagikan bagi anggota-anggota dari sebuah komunitas.

2.1.2 Pengertian Pembelajaran Informal

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan melalui tiga jalur, yaitu: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pengertian pendidikan informal adalah jalur pendidikan mandiri yang diperoleh dari keluarga maupun lingkungan dengan bentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri. Hasil jalur pendidikan informal dapat diakui jika peserta didik dapat lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh seorang individu dari pengalamannya sehari-hari secara sadar maupun tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini berlangsung didalam keluarga, didalam pergaulan sehari-hari, masyarakat, dan dalam pekerjaan. Ujar Ahmadi dan Uhbiyati (2009, hlm. 97).

Menurut Soedomo (dalam Suprijanto, 2007, hlm. 8) pendidikan informal adalah pendidikan yang dimana seorang warga belajar tidak sengaja belajar dan proses pembelajaran tidak dilakukan secara sengaja untuk membantu warga belajar.

Sedangkan menurut Joesoef (2004, hlm. 65-67) pendidikan informal tidak hanya pendidikan yang paling tua akan tetapi menurut sejarahnya juga merupakan pendidikan yang memiliki kegiatan paling banyak dan memiliki jangkauan yang paling luas. Sasaran dari pendidikan informal tidak hanya kategori sosial dari kelompok usia tertentu, melainkan semua kelompok usia. Dapat berlangsung kapan saja dan dimana saja. Pendidikan informal dapat menyampaikan beragam macam hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Pendidikan informal dapat diraih melalui proses identifikasi, imitasi, dan sugesti dalam rangka *learning by doing*.

Rohman (2009, hlm. 171) mengungkapkan bahwa pendidikan informal merupakan jenis pendidikan yang memiliki ciri tidak terorganisir secara struktural, tidak memngeneal adanya kredensial, tidak terdapat penjenjangan kronologis, lebih berupa hasil pengalaman belajar individu secara mandiri. Bentuk yang secara dapat

dilihat dari pendidikan jenis ini yakni pendidikan yang berlangsung dalam keluarga. Didalam sebuah keluarga tidak terdapat kurikulum, jenjang, standarisasi program, dan lain sebagainya pendidikan yang terjadi dalam sebuah keluarga bersifat ilmiah. Contoh lain dari pendidikan informal ini yaitu media massa, kampanye dan berbagai bentuk partisipasi didalam sebuah organisasi kemasyarakatan.

Pendapat lain diungkapkan oleh Pidarta (2009, hlm. 20) menyatakan lembaga pendidikan di Indonesia dalam garisnya besarnya terbagi menjadi tiga bagian yakni: (1) Lembaga pendidikan jalur formal, yang terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan tinggi; (2) Lembaga pendidikan jalur nonformal; (3) pendidikan informal ialah pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penulis simpulkan bahwa pendidikan informal adalah bentuk pendidikan yang tidak terikat dan tidak terencana, pembelajaran ini berlangsung secara mandiri dan sepanjang hayat, warga belajar dapat belajar dimana saja dan kapan saja bahkan melalui pengalaman dan kehidupannya sehari-hari. Pembelajaran informal paling dasar dan pertama terjadi di lingkungan keluarga dan semakin besar seorang individu maka semakin luas pula jangkauan seorang individu untuk belajar secara informal contohnya didalam sebuah masyarakat.

Menurut Daniel Schugurensky (2000) (dalam Elih Sudiapermana, 2009, hlm. 2) menyatakan bahwa untuk informal akan lebih tepat disebut sebuah pembelajaran bukan sebuah pendidikan, hal tersebut dikarenakan dalam sebuah proses belajar informal tidak terdapat sebuah lembaga pendidikan, tidak adanya kurikulum yang diresepkan, dan tidak ada kehadiran seorang instruktur/guru yang memiliki otoritas secara institusional.

George Axinn (dalam Sutaryat, 1984, dalam Elih Sudiapermana, 2009, hlm. 3) dengan pendekatan kesadaran tujuan dari masing-masing pihak yang memiliki keterlibatan dalam pendidikan (peserta didik dan pendidik) mencoba untuk menempatkan pendidikan informal dalam suatu kwadran proses pendidikan yang dimana salah satu pihak tidak menyadari akan tujuan pendidikan yang dilakukannya. Dalam artian kesadaran dalam melakukan proses belajar hanya dari salah satu pihak.

Livingstone (1998) (dalam Elih Sudiapermana, 2009, hlm. 3) mengartikan pendidikan informal sebagai segala aktifitas yang melibatkan pursuit pemahaman, pengetahuan, atau kecakapan yang dilaksanakan diluar kurikulum lembaga yang sudah disediakan oleh program pendidikan, atau kursus. Hal yang menjadi dasar pendidikan informal seperti tujuan, proses, isi, cara, media, evaluasi, dan lain sebagainya dapat ditentukan oleh individu serta kelompok yang memilih untuk terlibat didalamnya, tanpa kehadiran seorang instruktur yang memiliki wewenang secara lembaga. Dalam beberapa kajian akademik yang menjadi indikator dari pendidikan informal selalu memiliki kaitan yang erat dengan kemandirian belajar serta tidak ada pihak tertentu yang dengan sadar dan sengaja membangun sebuah interaksi dan melakukan intervensi.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mandiri memiliki arti “berdiri sendiri”. Kemandirian belajar merupakan belajar mandiri, tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain, peserta belajar memiliki keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar, bersikap, berbangsa maupun bernegara. Menurut Ahmadi dan Uhbiyati (1990, hlm. 13)

Desi Susilowati (2009, hlm. 7-8) mendeskripsikan kemandirian belajar sebagai berikut:

1. Kemandirian dipandang sebagai sebuah sikap yang sudah ada pada setiap individu dan situasi pembelajaran;
2. Kemandirian tidaklah memiliki arti memisahkan diri dari orang lain;
3. Pembelajaran mandiri dapat mentransfer hasil belajarnya yang berupa keterampilan serta pengetahuan dalam berbagai stuasi;
4. Peserta belajar untuk meningkatkan tanggung jawab dalam mengambil berbagai keputusan;
5. Peserta belajar yang belajar secara mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya dan aktivitas seperti membaca sendiri, latihan, belajar kelompok, dan kegiatan korespondensi;
6. Beberapa institusi pendidikan menemukan cara untuk mengembangkan belajar mandiri melalui program pembelajaran terbuka; dan
7. Peran efektif pendidik dalam belajar mandiri masih dimungkinkan seperti berdialog dengan siswa, mencari sumber, mengembangkan berfikir kritis, dan mengevaluasi hasil.

Kemandirian belajar merupakan kondisi dimana aktifitas belajar yang mandiri tidak tergantung kepada orang lain, memiliki tanggung jawab serta kemauan sendiri dalam menuntaskan masalah belajarnya. Kemandirian belajar akan tercipta apabila peserta belajar secara aktif mengendalikan sendiri segala sesuatu

yang dikerjakan, mengevaluasi serta selanjutnya merencanakan sesuatu yang lebih dalam kegiatan pembelajaran serta peserta belajar berperan aktif dalam proses pembelajaran.

2.2 Partisipasi Anggota Komunitas Dangdut

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Made Pidarta (dalam Siti Irene Astuti D, 2011, hlm. 31-32) Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan tersebut dapat berupa keterlibatan emosi dan mental serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (inisiatif) dalam semua kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung tercapainya tujuan serta tanggungjawab atas segala keterlibatannya.

Partisipasi adalah keterlibatan emosi serta mental seseorang di dalam situasi kelompok tertentu yang mendorong mereka untuk mendukung tercapainya tujuan kelompok tersebut serta ikut bertanggungjawab terhadap kelompok tersebut. Menurut Huneryear dan Heoman (dalam Siti Irene Astuti D, 2011, hlm. 32) partisipasi adalah sebagai keterlibatan emosional dan mental dalam situasi kelompok yang mendorong seorang individu memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok dan membagi tanggungjawab bersama.

Pasaribu (2012, hlm. 79) menuliskan partisipasi merupakan sebuah bentuk keikutsertaan pikiran serta emosi atau perasaan dari seseorang dalam situasi kelompok yang dapat mendorong dirinya untuk memberikan sumbangsih kepada kelompok tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan ikut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Theresia (2014, hlm. 196), partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Secara singkat Fasli Djalal dan Dedi Supardi (2001, hlm. 201-202) menerangkan bahwa partisipasi juga dapat diartikan bahwa seseorang yang membuat keputusan memberikan saran kepada seseorang, kelompok, atau masyarakat ikut terlibat dalam menyampaikan saran serta pendapat, keterampilan, barang, jasa, dan bahan. Partisipasi juga dapat diartikan bahwa sebuah kelompok mengenali masalah yang terjadi pada kelompok

itu sendiri, mengkaji apa yang akan menjadi pilihan mereka, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.

Mikkelsen (1999, hlm. 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, sebagai berikut:

1. Partisipasi merupakan sebuah kontribusi secara sukarela dari masyarakat tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” masyarakat untuk meningkatkan keinginan menerima serta kemampuan untuk memberikan tanggapan proyek-proyek pembangunan;
3. Partipasi adalah keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam proses perubahan yang ditentukan oleh sendiri;
4. Partisipasi yaitu sebuah proses aktif, yang didalamnya terkandung arti bahwa individu atau kelompok yang saling terkait, mengambil inisiatif serta menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal tersebut;
5. Partisipasi yakni pemantapan dialog diantara masyarakat setempat dengan staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, sehingga diperoleh informasi mengenai konteks lokal, serta dampak social; dan
6. Partisipasi merupakan proses keterlibatan masyarakat didalam sebuah pembangunan kehidupan, diri, serta lingkungan mereka.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang partisipasi diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan secara aktif dari seorang individu atau sekelompok orang (masyarakat) secara tersadar untuk memberikan kontribusi tanpa paksaan secara sukarela dalam sebuah program pembangunan yang terlibat dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga pada tahap akhir yakni evaluasi untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan partisipasi adalah keikutsertaan anggota komunitas dalam proses pembelajaran informal yang terjadi di Komunitas Dangdut Bandung.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan agar masyarakat dalam partisipasinya memiliki motivasi. Seperti yang disampaikan

oleh Yuwono (2001, hlm. 124) memberikan beberapa rincian mengenai partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan social dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

2.2.2 Prinsip-prinsip Partisipasi

Prinsip-prinsip partisipasi sudah tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Partisipasi yang disusun oleh *Departement for International Development (DFIF)* (dalam Monique Sumampouw, 2004, hlm. 106-107) adalah sebagai berikut:

1. Cakupan. Semua orang atau yang menjadi perwakilan dari kelompok yang merasakan dampak dari hasil suatu keputusan atau proses pembangunan.
2. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada hakikatnya setiap orang memiliki kemampuan, keterampilan, serta prakarsa dan juga memiliki hak untuk menggunakan prakarsa tersebut didalam setiap proses yang berguna untuk membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang serta struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi. Semua pihak dapat mengembangkan komunikasi serta iklim berkomunikasi secara terbuka dan kondusif sehingga timbulnya dialog.

4. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat dapat menyeimbangkan pembagian kekuasaan serta kewenangan guna tidak terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak memiliki tanggung jawab yang jelas didalam setiap proses oleh sebab itu adanya kesetaraan kewenangan (Sharing power) serta keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan serta langkah-langkah berikutnya.
6. Pemberdayaan (Empowerment). Keikutsertaan berbagai pihak tidak lepas dari berbagai kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga melalui keikutsertaan secara aktif dalam setiap kegiatan, terjadi proses saling belajar serta saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerjasama. Dibutuhkan adanya sebuah kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan sehingga mengurangi berbagai kelemahan, khususnya yang memiliki kaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2.2.3 Bentuk-bentuk partisipasi

Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2001, hlm. 38) membagi partisipasi menjadi dua berdasarkan pada cara keterlibatannya, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila seseorang menampilkan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi tersebut. Partisipasi secara langsung ini terjadi apabila seseorang dapat mengajukan pandangannya sendiri, dapat membahas pokok permasalahan yang sedang terjadi, serta dapat mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi tidak langsung ini terjadi apabila seseorang mendelegasikan partisipasinya. Cohen dan Uphoff (dalam Siti Irene AstutiD, 2011, hlm. 39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan menimbulkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial. Keempat jenis partisipasi tersebut, sebagai berikut:

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif

dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Cohen dan Uphoff (dalam Siti Irene Astuti D., 2011, hlm. 39) Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan ini adalah suatu proses pemilihan alternative yang didasari pada pertimbangan yang menyeluruh serta rasional.

Kedua, partisipasi dalam proses pelaksanaan. Partisipasi masyarakat didalam proses pelaksanaan sebuah program yaitu lanjutan dari rencana yang sudah disepakati sebelumnya, baik yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat diperlukan keikutsertaan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha, Coher dan Hoff (dalam Siti Irene Astuti D., 2011, hlm. 39), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Sedangkan menurut Effendi (dalam Siti Irene Astuti D., 2011, hlm. 58) bahwa bentuk partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal serta partisipasi horizontal.

1. Partisipasi vertikal

Disebut sebagai partisipasi vertikal karena partisipasi ini terjadi dalam bentuk kondisi tertentu dimana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan masyarakat berada sebagai status bawahan.

2. Partisipasi horizontal

Masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu sama lain. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Raharjo (dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2012, hlm. 87) mengemukakan bahwa adanya tiga variasi bentuk partisipasi, yakni:

1. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang dilaksanakan dengan kegiatan tertentu saja bertujuan untuk tercapainya pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan sulit diatasi.
2. Partisipasi penuh (*full scale participation*), artinya partisipasi secara keseluruhan dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
3. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaan masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengajukan kesempatan untuk mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

2.2.4 Indikator Keberhasilan Partisipasi

Sri Surhayati (2008, hlm. 25) menyatakan bahwa keberhasilan peningkatan partisipasi dalam menyusun rencana strategi pembangunan dapat dilihat dengan beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Kontribusi atau dedikasi para anggota meningkat didalam hal jasa (keterampilan atau pemikiran), moral, material atau barang, dan finansial.
2. Kepercayaan anggota yang meningkat kepada komunitas terutama berkaitan dengan kebersihan dan kewibawaan.

3. Tanggungjawab anggota terhadap komunitas meningkat.
4. Kualitas serta kuantitas masukan (kritik dan saran) guna peningkatan mutu meningkat.
5. Kepedulian anggota terhadap setiap langkah yang diambil dalam komunitas meningkat.
6. Keputusan yang dibuat oleh komunitas mengekspresikan apresiasi serta pendapat anggota dan mampu meningkatkan kualitas.

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Rizky Anggara (2016, hlm. 14-15) menyatakan factor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yakni:

1. Faktor Usia, faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Karena kelompok usia menengah ke atas lebih keterikatan dengan nilai moral dan norma masyarakat yang lebih mantap, sehingga cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
2. Faktor Jenis Kelamin, jenis kelamin nilai yang cukup lama dominan dalam kultur. Berbagai bangsa semakin lama menilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
3. Faktor Pendidikan, pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
4. Faktor Lamanya Tinggal, rentang waktu seseorang tinggal disebuah lingkungan tertentu serta pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut berpengaruh pada tingkat partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal, maka rasa memiliki terhadap lingkungan tersebut cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar di setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.3 Analisis SWOT

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009, hlm. 63) mengartikan bahwa analisis SWOT sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Freddy Rangkuti (2013, hlm. 19) mengartikan analisis SWOT sebagai analisa yang berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Sedangkan menurut Pearce Robinson (1997, hlm. 229-230) analisis SWOT adalah salah satu instrument analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang sudah dikenal luas. Analisis ini berdasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Apabila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek maupun konsep yang didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu kekuatan, peluang, kelemahan, serta ancaman. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menganalisis keikutsertaan anggota komunitas dengan menggunakan analisis SWOT sehingga dapat dilihat apa yang menjadi factor kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman komunitas tersebut.

Menurut Sondang P. Siagian (2000, hlm. 173) analisis SWOT merupakan singkatan dari *strength*, *opportunity*, *weakness*, *threat*, yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan (*Strength*) sumberdaya keterampilan atau keunggulan-keunggulan relative terhadap pesaing. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada kepemilikan keunggulan komparatif bagi suatu organisasi.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Yang dimaksud dengan kelamhan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.

3. Peluang(*Opportunity*)

Definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi kinerja organisasi.

4. Ancaman (*Threat*)

Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan.